

Katalog : 9302023.2103

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN NATUNA MENURUT PENGELUARAN

2013 - 2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NATUNA**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN NATUNA MENURUT PENGELUARAN

2013 - 2017



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN NATUNA
MENURUT PENGELUARAN 2013-2017**

ISSN: -

Nomor Publikasi: 21030.1804

Katalog BPS: 9302023.2103

Ukuran Buku/*Book Size*: 21,5 cm x 29,7 cm

Jumlah halaman: viii + 60 halaman

Naskah:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:

Seksi Intergrasi Pengolahan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

Dicetak Oleh/Printed By:

Percetakan Rizki Mandiri

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum/*General in Charge*:

Drs. Bustami

Penyunting/*Editor*:

Drs. Bustami

Penulis/*Writer*:

Lia Oktavera, SST

Emilia Annisa, SST

Pengolah Data/*Data Processor*:

Lia Oktavera, SST

Gambar Kulit/*Cover Design*:

Seksi Intergrasi Pengolahan Diseminasi Statistik

<https://natum.kub.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor, dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/ Industry), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/ Expenditure) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan/Income). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts* 2008 seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang. Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Ranai, Agustus 2018
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NATUNA

KEPALA,



Drs. Bustami

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENJELASAN UMUM	1
1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	1
1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB	4
II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	9
2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA	11
2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)	13
2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)	15
2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	17
2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)	19
2.6 EKSPOR - IMPOR	21
III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN NATUNA BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2013-2017	23
3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN	25
3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	30
3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT	34
3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	34
3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	36
3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI	37
3.7 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH	38
IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013-2017	41
4.1 PDRB (NOMINAL)	43
4.2 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB	44
4.3 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB	45
4.4 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)	45
V. PENUTUP	49
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

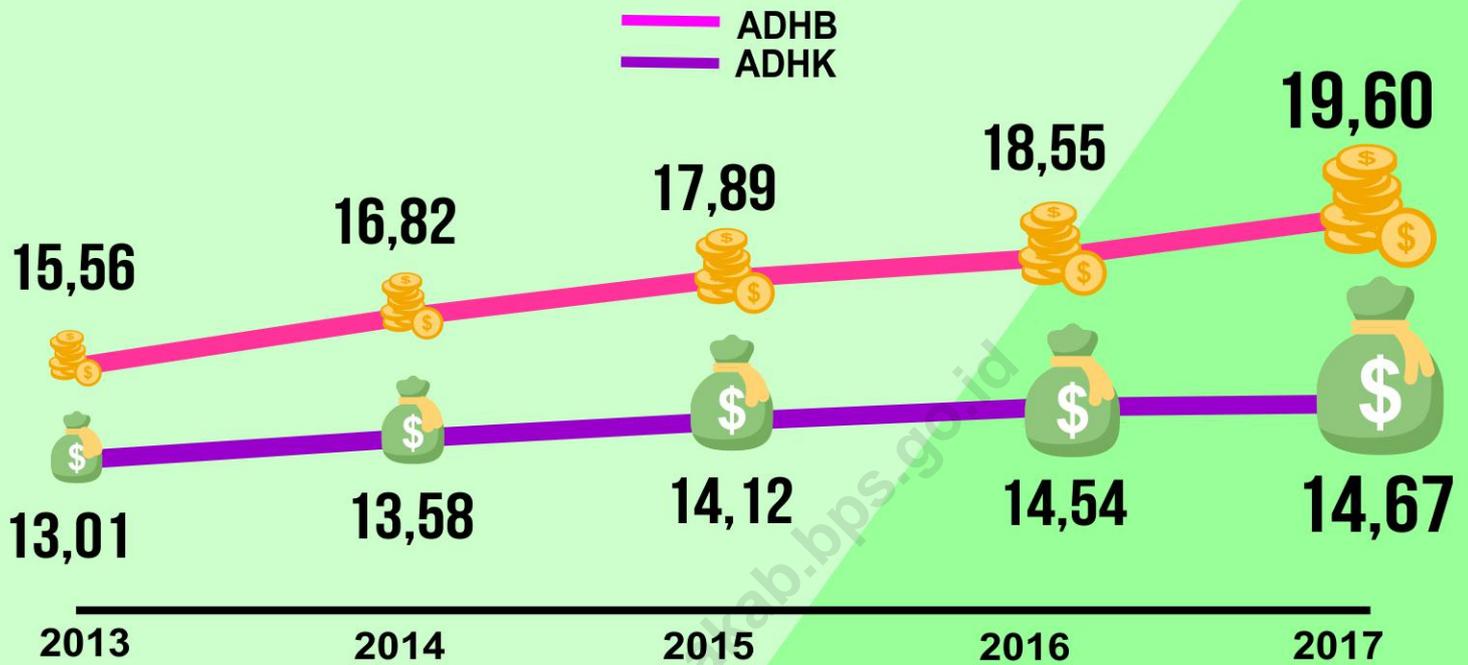
		Halaman
Tabel 1	Tabel 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Natuna menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 (Juta Rp)	26
Tabel 2	Tabel 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2010) Kabupaten Natuna menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 (Juta Rp)	26
Tabel 3	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Natuna Tahun 2013-2017 (Persen)	28
Tabel 4	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Natuna Tahun 2013-2017 (Persen)	29
Tabel 5	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Natuna, Tahun 2013-2017	31
Tabel 6	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Natuna, Tahun 2013-2017	32
Tabel 7	Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Natuna, Tahun 2013-2017	33
Tabel 8	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kabupaten Natuna, Tahun 2013-2017	34
Tabel 9	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Natuna, Tahun 2013-2017	35
Tabel 10	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Natuna, Tahun 2013-2017	36
Tabel 11	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Natuna, Tahun 2013-2017	38
Tabel 12	Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Natuna, Tahun 2013-2017	39
Tabel 13	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Natuna, Tahun 2013-2017	43
Tabel 14	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2013-2017	44
Tabel 15	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Natuna, Tahun 2013-2017	45
Tabel 16	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i> Kabupaten Natuna, Tahun 2013-2017	46

DAFTAR LAMPIRAN

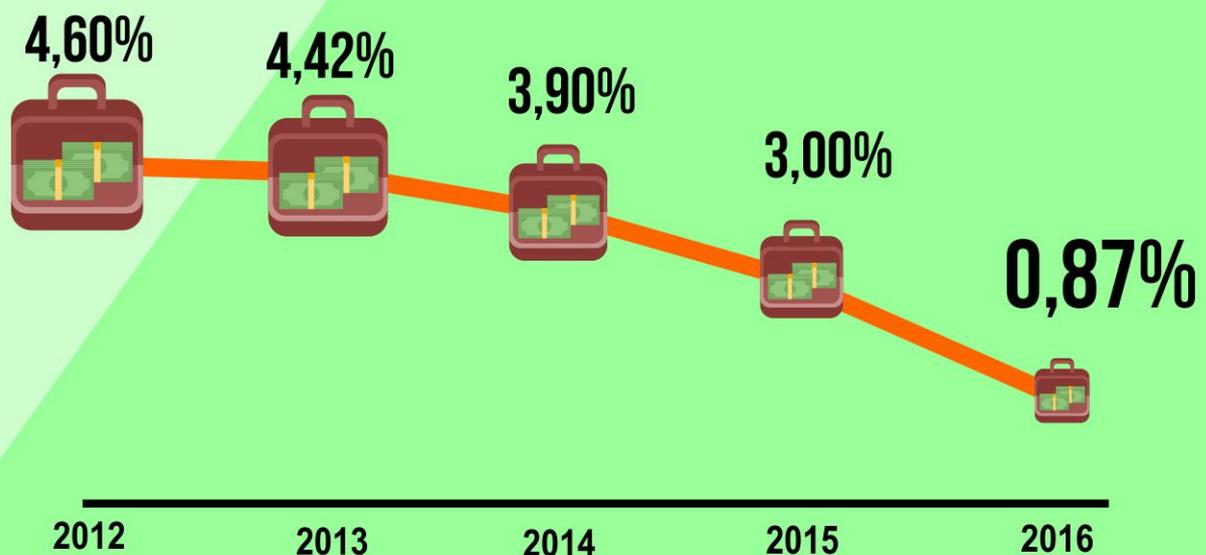
Halaman

Lampiran.1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Kabupaten Natuna Tahun 2013-2017 (Juta Rp)	55
Lampiran.2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (2010) menurut Pengeluaran Kabupaten Natuna Tahun 2013-2017 (Juta Rp)	56
Lampiran.3	Distribusi PDRB Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 (Persen)	57
Lampiran.4	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 (Persen)	58
Lampiran.5	Indeks Implisit PDRB Kabupaten Natuna menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 (Persen)	59
Lampiran.6	Laju Implisit PDRB Kabupaten Natuna menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 (Persen)	60

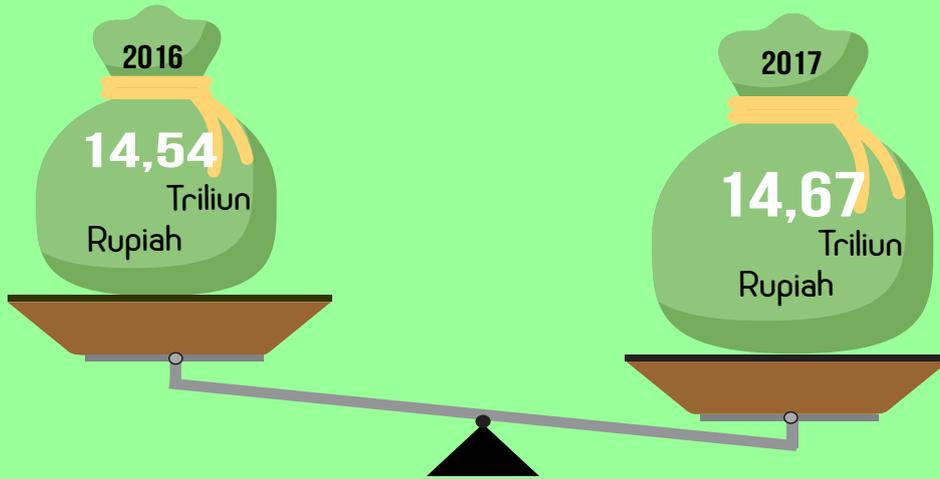
**PERBANDINGAN PDRB ADHB DAN ADHK 2010 KABUPATEN NATUNA
MENURUT PENGELUARAN, 2013 - 2017 (TRILIUN RUPIAH)**



**PERTUMBUHAN PDRB ADHK 2010 KABUPATEN NATUNA
MENURUT PENGELUARAN, 2013 - 2017**



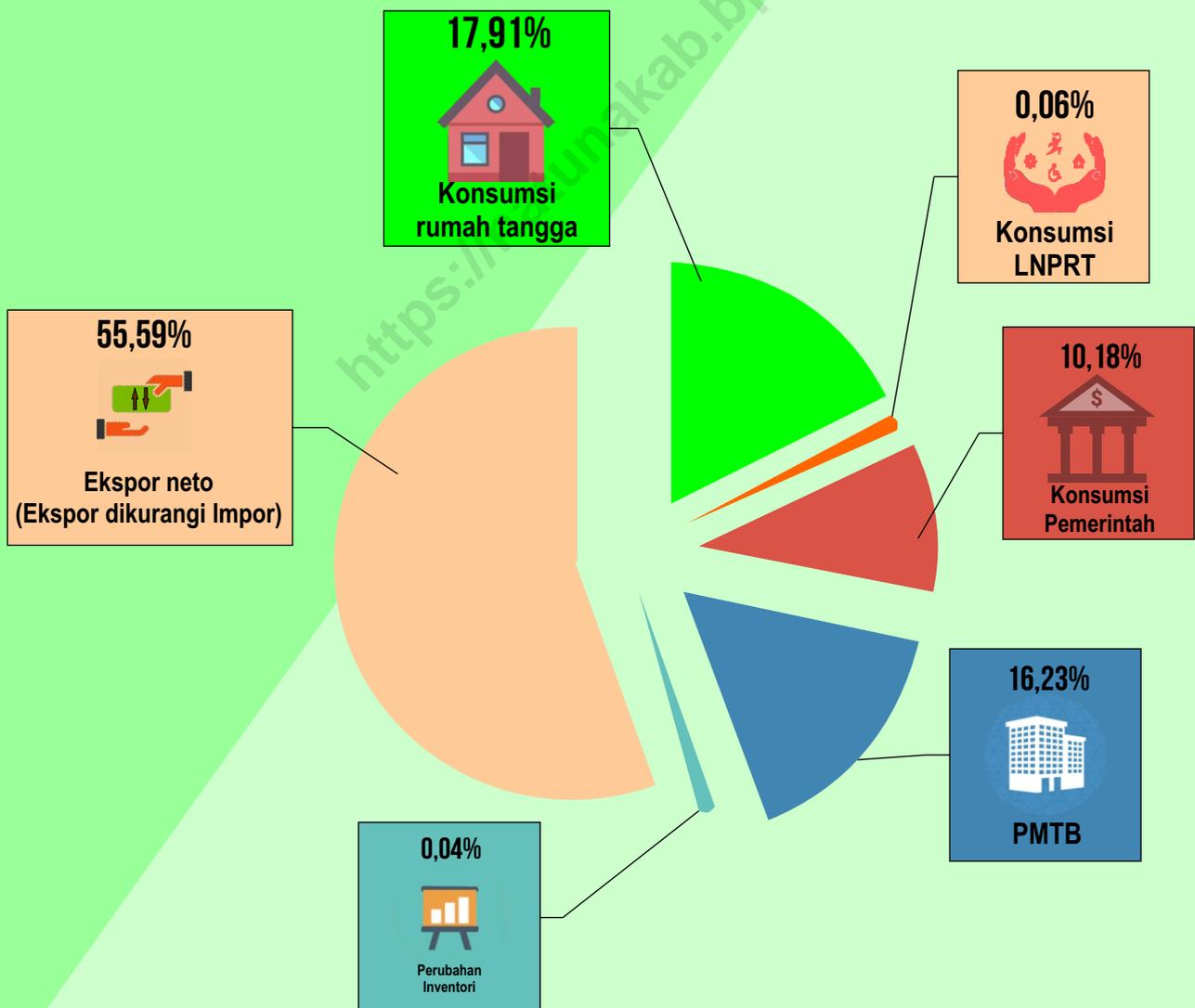
PERBANDINGAN PDRB ADHK KABUPATEN NATUNA MENURUT PENGELUARAN



PDRB ADHB KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2017



19,60
triliun rupiah



DISTRIBUSI PDRB ADHB KABUPATEN NATUNA MENURUT PENGELUARAN, 2017



1

PENJELASAN UMUM

BAB I PENJELASAN UMUM

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (frame work) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (basic measure) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (product) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (expenditure) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (production). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (supply side) dan sisi permintaan (demand side) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii)

1 Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

2 Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)

memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (equivalent). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (output) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “output akhir (final output)”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan Keynesian sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (Income)	= PDRB Produksi
C (Consumption)	= Konsumsi akhir
GFCF (Gross Fixed Capital Formation)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (external transaction). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari System of National Accounts (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk Supply and Use Tables (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (benchmark) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (account) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan modeling dan forecasting.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun ;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (Producers Price Index);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 1. Sumber daya hayati (cultivated biological resources/CBR). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 2. Sistem persenjataan (military weapon systems/MWS). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 3. Penelitian dan pengembangan (research and development/RnD). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 4. Eksplorasi dan evaluasi mineral (mineral exploration and evaluation/MEE). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 5. Bank Sentral (Central Bank/CB). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 6. Komputer software (computer software and databases/CSD). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan databases, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 7. Produk kekayaan intelektual (entertainment, literary or artistic originals/ELA). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

8. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- Metodologi
Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (Financial intermediation services indirectly measured / FISIM). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (deposits), bunga pinjaman (loans), dan suku bunga referensi (reference). Metoda ini menggantikan metoda Imputed Bank Services Charge (IBSC).
 - Valuasi
Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (Basic Price). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.
 - Klasifikasi
Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000/Base Year 2000	PDRB Tahun Dasar 2010/Base Year 2010
9. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 10. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 11. Pembentukan Modal Tetap Bruto 12. Perubahan Inventori 13. Ekspor 14. Impor	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 5. Perubahan Inventori 6. Ekspor 7. Impor



2

**METODE ESTIMASI DAN
SUMBER DATA**

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan).
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

1. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
2. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
3. Penyusutan
4. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS

- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil up-dating direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar. Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

PK-P atas dasar harga Berlaku = Output – Penjualan barang dan jasa + Social transfer in kind purchased market production + Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

PK-P Kabupaten/Kota adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (financial leasing) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (Cultivated Biological Resources/CBR). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (financial leasing) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (Consumption of Fixed Capital) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (cultivated asset), produk kekayaan intelektual (intellectual property products);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan,

pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-deflate PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$\text{PMTB}_{\text{adhk}} = \text{PMTB}_{\text{adhb}} / \text{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (intermediate consumption) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (work in progress), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (material & supplies), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) – Volume inventori (t-1) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) - Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

2.6 EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

<https://natunakab.bps.go.id>



3

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN NATUNA

Berdasarkan PDRB Pengeluaran Tahun 2013-2017

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Natuna akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2011 s.d. 2015, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional, terlebih lagi posisi wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang sangat strategis yakni sebagai pintu masuk ke wilayah Republik Indonesia akan berimbas pada Kabupate/Kota lainnya.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Natuna digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

Kondisi perekonomian Kabupaten Natuna menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017). Hal ini terlihat dari nilai PDRB yang terus meningkat. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Natuna menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumahtangga	2 146 046.49	2 420 322.27	2 780 468.57	3 181 781.18	3 511 910.57
Konsumsi LNPRT	7 902.55	8 693.12	9 878.23	10 495.23	11 031.27
Konsumsi Pemerintah	1 439 389.08	1 664 013.84	1 745 351.69	1 904 617.23	1 994 965.80
PMTB	2 177 585.03	2 471 816.12	2 710 557.53	2 970 843.41	3 182 302.42
Perubahan Inventori	57 387.08	53 129.71	15 355.77	12 403.73	7 313.00
Ekspor	20 832 035.59	22 538 156.90	25 930 476.87	26 614 565.66	27 917 008.87
Impor	11 102 016.65	12 334 347.82	15 298 102.38	16 142 378.30	17 019 567.16
Total PDRB	15 558 329.18	16 821 784.14	17 893 986.29	18 552 328.13	19 604 964.77

keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara

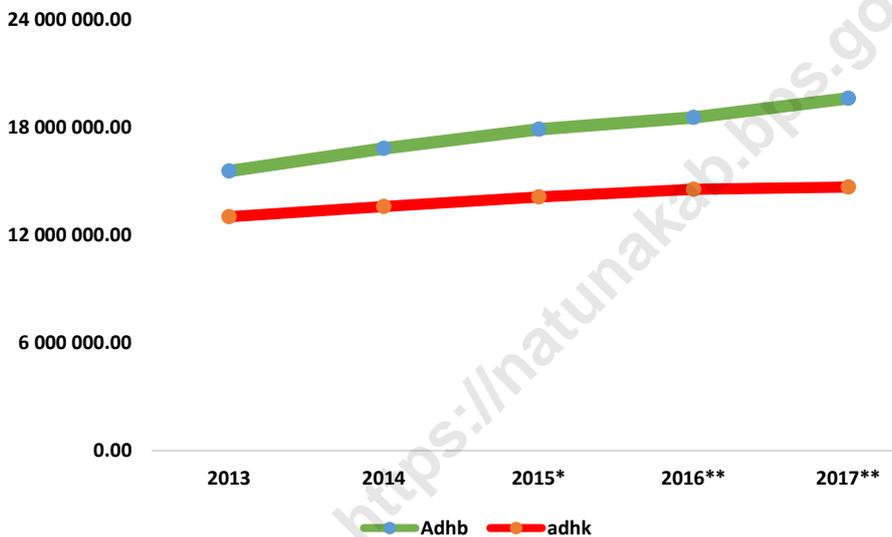
Nilai PDRB Kabupaten Natuna (adh Berlaku) selama periode tahun 2013 s.d 2017 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Pada tahun 2013 nilainya sebesar 15.58 triliun rupiah dan meningkat menjadi 19,60 triliun rupiah di tahun 2017.

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2010) Kabupaten Natuna menurut Pengeluaran 2013-2017 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015*	2016**	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumahtangga	1 875 354.42	2 011 148.55	2 155 445.23	2 333 095.12	2 460 717.96
Konsumsi LNPRT	6 453.01	6 882.63	7 213.32	7 404.26	7 450.27
Konsumsi Pemerintah	1 258 378.69	1 309 538.22	1 250 203.43	1 287 583.88	1 305 879.66
PMTB	1 814 922.76	1 905 122.19	1 950 716.61	1 987 079.85	2 080 682.21
Perubahan Inventori	38 397.36	34 924.78	9 766.44	7 537.40	4 208.12
Ekspor	19 132 890.56	20 157 549.55	20 739 568.11	21 260 163.90	21 394 713.58
Impor	11 116 565.30	11 839 758.98	11 997 647.22	12 343 935.51	12 588 228.44
Total PDRB	13 009 831.50	13 585 406.93	14 115 265.93	14 538 928.91	14 665 423.36

keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara

Selain dinilai atas dasar harga adh Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2013–2017, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Natuna berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2 diatas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.



Grafik1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Natuna, Tahun 2013 – 2017

Dari grafik 1, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), dan Ekspor Neto (E) atau Ekspor (X) dikurangi Impor (M).

Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Natuna Tahun 2013-2017

Komponen Pengeluaran	Persen				
	2013	2014	2015*	2016**	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah tangga	13.79	14.39	15.54	17.15	17.91
Konsumsi LNPRT	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
Konsumsi Pemerintah	9.25	9.89	9.75	10.27	10.18
PMTB	14.00	14.69	15.15	16.01	16.23
Perubahan Inventori	0.37	0.32	0.09	0.07	0.04
Ekspor	133.90	133.98	144.91	143.46	142.40
Impor	71.36	73.32	85.49	87.01	86.81
Total PDRB	100	100	100	100	100

keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara

Berdasarkan tabel 3 di atas terlihat bahwa selama periode 2013-2017, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir baik oleh rumah tangga, LNPRT maupun pemerintah. Konsumsi akhir terbesar masih digerakkan oleh konsumsi akhir rumah tangga yakni sekitar 13-17 persen, kemudian dilanjutkan oleh konsumsi akhir pemerintah dan konsumsi akhir LNPRT yakni masing-masing berkisar antara 9-10 persen dan 0,06 persen. Hal tersebut membuktikan bahwa peran pemerintah dan LNPRT masih kecil dibandingkan dengan rumah tangga.

PMTB juga tidak kalah pentingnya dengan konsumsi akhir, dimana mempunyai kontribusi sebesar 16 persen ditahun 2017 terhadap PDRB Kabupaten Natuna. Sebelumnya hanya sekitaran 14-15 persen. Besarnya kontribusi PMTB terhadap PDRB menunjukkan perekonomian Kabupaten Natuna berkualitas karena PMTB mampu menggerakkan perekonomian dengan cepat (memiliki efek multiplier yang tinggi terhadap perekonomian). Sedangkan kontribusi inventori terhadap PDRB Kabupaten Natuna sangat kecil hanya berkisar antara 0,04-0.37 persen dan itu semakin lama semakin menurun.

Di sisi lain, perdagangan internasional dan regional tidak dapat dipandang sebelah mata. Letak geografis dan sumber daya alam yang ada dan berbatasan langsung dengan luar negeri menjadikan Kabupaten Natuna sebagai ladang keluar masuk ke wilayah Kepulauan Riau. Hal inilah yang menyebabkan *trade balance* Kabupaten Natuna mencapai sekitar 55-65 persen dari total PDRB (net ekspor).

Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Natuna Tahun 2013—2017

Komponen Pengeluaran	Persen				
	2013	2014	2015*	2016**	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah tangga	8.11	7.24	7.17	8.24	5.47
Konsumsi LNPR	5.77	6.66	4.80	2.65	0.62
Konsumsi Pemerintah	5.78	4.07	(4.53)	2.99	1.42
PMTB	4.13	4.97	2.39	1.86	4.71
Perubahan Inventori	(35.88)	(9.04)	(72.04)	(22.82)	(44.17)
Ekspor	4.60	5.36	2.89	2.51	0.63
Impor	5.00	6.51	1.33	2.89	1.98
Total PDRB	4.60	4.42	3.90	3.00	0.87

keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna dari tahun 2013 s.d. 2017 secara rata-rata mencapai 3,36 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 4,60 persen (2013); 4,42 persen (2014); 3,90 persen (2015); 3,00 persen (2016) dan 0,87 persen (2017). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 4,60 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2017. Ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Secara kumulatif perekonomian Kepulauan Riau yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2017 tumbuh sebesar 2,01 persen mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 5,02 persen, dengan perlambatan kinerja perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 Kabupaten Natuna juga mengalami dampaknya.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam konsumsi akhir PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Data berikut, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2013–2017 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Data berikut (tabel 5), menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2013 – 2017 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2013 s.d 2017 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 17,91 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu 13,79 persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2013, secara umum setiap rumah tangga di Kabupaten Natuna menghabiskan dana sekitar 29.589,62 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 32.943,00 ribu rupiah (2014); 37.311,71 ribu rupiah (2015); 42.264,83 ribu rupiah (2016); dan menjadi 46.092,890 ribu rupiah (2017).

Tabel 5. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Natuna, Tahun 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	2,146,046.49	2,420,322.27	2,780,468.57	3,181,781.18	3,511,910.57
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	1,875,354.42	2,011,148.55	2,155,445.23	2,333,095.12	2,460,717.96
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	13.79	14.39	15.54	17.15	17.91
Rata-rata konsumsi per- kapi- ta/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	29,589.62	32,943.00	37,311.71	42,264.83	46,092.90
b. ADHK 2010	25,857.33	27,373.74	28,924.39	30,991.41	32,296.28
Pertumbuhan (%)					
a. Total Konsumsi RT	8.11	7.24	7.17	8.24	5.47
b. Per-Kapita	6.51	5.86	5.66	7.15	4.21
Jumlah penduduk (<i>orang</i>)	72,527	73,470	74,520	75,282	76,192

keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara
 Sumber: BPS Kabupaten Natuna

Sementara itu, pada perkiraan adh Konstan 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga cukup tinggi dengan kecenderungan menurun yang berada dikisaran 5,47 s.d 8,24 persen. Begitu juga dengan pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Natuna tumbuh, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per kapita secara "riil" berkisar antara 4,21 s.d 7,15 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga. Dimana pertumbuhan lima tahun terakhir tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan yang terendah pada tahun 2017.

Tabel 6. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Natuna, Tahun 2013—2017

Uraian	(Persen)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	51.84	50.89	51.47	52.59	52.52
b. Pakaian dan Alas Kaki	3.98	3.88	3.75	3.73	3.69
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9.47	9.57	9.43	9.18	9.07
d. Kesehatan & Pendidikan	7.11	7.26	7.10	6.89	6.81
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	24.64	25.32	25.15	24.58	24.87
f. Hotel & Restoran	1.36	1.48	1.57	1.54	1.54
g. Lainnya	1.60	1.59	1.53	1.49	1.48
Total Konsumsi	100	100	100	100	100

keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara
Sumber: BPS Kabupaten Natuna

Secara rata-rata dari tahun 2013 s.d 2017, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Natuna, bahwa konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk bukan makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk bukan makanan pada masing-masing tahun mencapai 48,16 persen (2013); 49,11 persen (2014); 48,53 persen (2015); 47,41 persen (2016) dan 47,48 persen (2017).

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Konsumsi makanan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting juga sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 7. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Natuna, Th 2013—2017

Uraian	(Persen)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7.45	6.57	6.96	9.27	4.64
b. Pakaian dan Alas Kaki	5.95	7.34	8.10	7.45	6.32
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8.52	7.09	7.24	7.36	4.21
d. Kesehatan & Pendidikan	7.24	6.44	5.91	4.82	5.46
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10.12	8.74	7.70	7.67	7.20
f. Hotel & Restoran	7.90	8.23	9.09	8.88	6.99
g. Lainnya	3.52	6.68	6.05	7.45	6.63
Total Konsumsi	8.11	7.24	7.17	8.24	5.47

keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara
Sumber: BPS Kabupaten Natuna

Dilihat dari pertumbuhan "riil" nya (tabel 7), pengeluaran rumah tangga untuk baik kelompok makanan maupun bukan makanan menunjukkan fluktuasi. Pertumbuhan kelompok bukan makanan dengan masing-masing sebesar 8,78 persen (2013) ; 7,91 persen (2014); 7,39 persen (2015); 7,24 persen (2016) dan 6,29 persen (2017). Pertumbuhan "riil" ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Secara rata-rata laju pertumbuhan yang dominan pada konsumsi akhir rumah tangga pada tahun 2013 s.d 2017 adalah sub kelompok Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya, diikuti Pakaian dan Alas Kaki serta Hotel dan Restoran. Pertumbuhan sub sektor ini berada pada kisaran 7-10 persen.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB yang minor.

Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kabupaten Natuna, Tahun 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (<i>juta Rp</i>)	13,968,669.25	15,558,329.18	16,821,784.14	17,893,986.29	18,552,328.13
b. ADHK 2010 (<i>juta Rp</i>)	12,437,318.63	13,009,831.50	13,585,406.93	14,115,265.93	14,538,928.91
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
Pertumbuhan (% ADHK)	5.53	4.60	4.42	3.90	3.00

keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara

Sumber: BPS Kabupaten Natuna

Konsumsi LNPRT baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan* menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun namun demikian peningkatan tersebut relatif stabil tiap tahunnya. Kegiatan LNPRT akan terlihat pada acara hari besar keagamaan, pemilu, kejadian bencana alam serta peristiwa lainnya yang melibatkan kegiatan sosial LNPRT. Seperti pada tahun 2017 pertumbuhan LNPRT sebesar 3,00 persen mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun 2015 idak banyak kegiatan non profit yang dilakukan.

Proporsi konsumsi LNPRT terhadap PDRB Kabupaten Natuna sangat kecil hanya sekitar 0,06 persen ditahun 2017. Dapat diambil kesimpulan bahwa guncangan yang terjadi pada konsumsi LNPRT tidak akan membawa pengaruh signifikan terhadap perekonomian.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Natuna serta bagaimana

perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Natuna, Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	1 439 389.08	1 664 013.84	1 745 351.69	1 904 617.23	1 994 965.80
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	1 258 378.69	1 309 538.22	1 250 203.43	1 287 583.88	1 305 879.66
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	9.25	9.89	9.75	10.27	10.18
Konsumsi Pemerintah per- kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	19 846.25	22 648.89	23 421.25	25 299.77	26 183.40
b. ADHK 2010	17 350.49	17 824.12	16 776.75	17 103.48	17 139.33
<u>Pertumbuhan</u>					
a. Total konsumsi pemerintah	8.11	7.24	7.17	8.24	5.47
b. Konsumsi perkapita	4.22	2.73	(5.88)	1.95	0.21
Jumlah penduduk (<i>org</i>)	72 527	73 470	74 520	75 282	76 192

keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara
Sumber: BPS Kabupaten Natuna

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 1.439 triliun rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2017 nilainya mencapai 1.994 triliun rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami fluktuasi sampai 9-10 persen. Pada tahun 2017 proporsi yang paling tinggi diantara 5 (lima) tahun belakangan ini.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah perkapita. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah perkapita adh Berlaku sebesar 26 183 ribu rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 9).

Rata-rata konsumsi pemerintah perkapita adh Konstan (2010) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya (lihat tabel 9). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Tetapi bila dilihat pertumbuhannya dari tahun ke tahun mengalami perlambatan. Dimana pada tahun 2013 laju pertumbuhan mencapai 4,22 persen dan pada tahun 2015 turun menjadi 0,21 persen.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 10. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Natuna, Tahun 2013-2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	2 177 585.03	2 471 816.12	2 710 557.53	2 970 843.41	3 182 302.42
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	1 814 922.76	1 905 122.19	1 950 716.61	1 987 079.85	2 080 682.21
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	14.00	14.69	15.15	16.01	16.23
Struktur PMTB					
a. Bangunan (<i>Juta Rp</i>)	1 572 555.61	1 784 167.38	1 974 613.23	2 167 543.11	2 288 162.56
(%)	72.22	72.18	72.85	72.96	71.90
b. Non Bangunan (<i>Juta Rp</i>)	605 029.42	687 648.74	735 944.30	803 300.30	894 139.86
(%)	27.78	27.82	27.15	27.04	28.10
Pertumbuhan (%)					
a. Bangunan	3.64	5.41	2.85	1.49	3.66
b. Non Bangunan	5.32	3.89	1.26	2.80	7.32
Total PMTB	4.13	4.97	2.39	1.86	4.71

keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara
Sumber: BPS Kabupaten natuna

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2013 – 2017 meningkat dari 4,13 persen (2013) menjadi 4,71 persen (2017).

Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Pertumbuhan di sektor bangunan meskipun cenderung meningkat tetapi polanya relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen PMTB lainnya.

Proporsi bangunan terhadap total PMTB berfluktuasi yang cenderung meningkat selama periode 2013 – 2017 berkisar diantara 14,00 s.d 16,23 persen. Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan pada tahun 2013 s.d 2017 relatif cukup melambat. Pada tahun 2013 pertumbuhan sub komponen bangunan sebesar 3,64 persen meningkat ditahun 2014 sebesar 5,41 persen dan terus melambat sampai tahun 2016 menjadi 1,49 persen dan di tahun 2017 menjadi 3,66 persen.

Sama halnya dengan sub komponen bangunan, jika dilihat pertumbuhannya, sub komponen non bangunan menunjukkan pola yang berfluktuatif antar tahunnya. Pada tahun 2013 pertumbuhan sub komponen non bangunan sebesar 5,32 persen, ditahun 2014 melambat sebesar 3,89 persen. Hal ini terus terjadi sampai tahun 2016 menjadi 2,80 persen dan ditahun 2017 meningkat menjadi 7,32 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang

barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 11. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Natuna, Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (<i>JutaRp</i>)	57,387.08	53,129.71	15,355.77	12,403.73	7,313.00
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	38,397.36	34,924.78	9,766.44	7,537.40	4,208.12
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	0.37	0.32	0.09	0.07	0.04

keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara
Sumber: BPS Kabupaten Natuna

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada tahun 2013 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 57,3 miliar rupiah, namun seiring dengan perkembangan perekonomian Kabupaten Natuna perubahan inventori di tahun 2017 menjadi 7,3 miliar rupiah. Begitu juga dengan atas dasar harga konstan mulai dari 38,4 miliar rupiah ditahun 2013 menjadi 4,2 miliar rupiah ditahun 2017. Sehingga proporsi struktur inventori semakin kecil.

3.7 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Dalam publikasi ini hanya menampilkan net ekspor. Net ekspor merupakan total ekspor dikurangi dengan total impor. Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi/kabupaten menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang

(residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda "positif" berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitungan ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output "bayangan". Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian. Penghitungan net ekspor di Kabupaten Natuna menggunakan metode tersebut. Karena tidak tersedianya sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan.

**Tabel 12. Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Natuna, Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor					
a. ADHB (Juta Rp)	9,730,018.94	10,203,809.08	10,632,374.50	10,472,187.35	10,897,441.71
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	8,016,325.26	8,317,790.56	8,741,920.89	8,916,228.39	8,806,485.14
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	61.96	62.54	60.47	59.03	60.03
Pertumbuhan	4.05	3.76	5.10	1.99	(1.23)

keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara
Sumber: BPS Kabupaten Natuna

Jika dilihat dari tabel 12 di atas terlihat bahwa Kabupaten Natuna sangat tergantung dengan perekonomian dari luar wilayah. Peranan net ekspor terhadap PDRB Kabupaten Natuna berkisar antara 59 s.d 62 persen dengan kumulatif yang fluktuatif. Baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2010 net ekspor mempunyai pola terus meningkat. Dimana puncak paling tinggi berada di tahun 2014 dengan 62,54 persen dan yang terendah di tahun 2016 sebesar 59,03 persen.

Jika dilihat atas dasar harga konstan 2010, net ekspor menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang positif. Tetapi hanya di tahun 2017 pertumbuhan net ekspor minus sebesar 1,23 persen. Jika dilihat dari nilai net ekspor yang selalu positif baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Natuna kuat hingga nilai tambah yang dihasilkan dapat dinikmati oleh wilayah lain.



4

PERKEMBANGAN AGREGAT

PDRB Pengeluaran Kabupaten Natuna Tahun 2013-2017

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita. PDRB per kapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Untuk memacu peningkatan PDRB perkapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk.

Tabel 13. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Natuna, Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Juta Rp</i>)					
- ADHB	15 558 329.18	16 821 784.14	17 893 986.29	18 552 328.13	19 604 964.77
- ADHK 2010	13 009 831.50	13 585 406.93	14 115 265.93	14 538 928.91	14 665 423.36
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	214 517.75	228 961.27	240 123.27	246 437.77	257 310.02
- ADHK 2010	179 379.15	184 910.94	189 415.81	193 126.23	192 479.83
Pertumbuhan					
PDRB perkapita ADHK 2010 (%)	3.06	3.08	2.44	1.96	(0.33)
Jumlah penduduk (<i>org</i>)	72 527	73 470	74 520	75 282	76 192

keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara
Sumber: BPS Kabupaten natuna

Namun demikian perlu diperhatikan bahwa PDRB perkapita yang disajikan disini belum memperhitungkan pendapatan yang keluar atau pendapatan yang masuk ke Kabupaten Natuna (*Net Factor Income From Abroad*). Sehingga perkapita yang disajikan disini belum sepenuhnya menggambarkan pendapatan riil masyarakat. Kesulitan memperoleh data pendapatan yang keluar-masuk Kabupaten Natuna tersebut, menyebabkan PDRB perkapita tersebut digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur rata-rata pendapatan penduduk.

Nilai PDRB dan PDRB Perkapita lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pertumbuhan PDRB Perkapita secara riil berkisar antara -0,33 s.d 3,08 persen. Hal ini perlu menjadikan perhatian, agar meningkatkan PDRB perkapita harus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daripada laju pertumbuhan penduduk.

4.2 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Natuna digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 14. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Kabupaten Natuna, Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	2 146 046.49	2 420 322.27	2 780 468.57	3 181 781.18	3 511 910.57
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	2 177 585.03	2 471 816.12	2 710 557.53	2 970 843.41	3 182 302.42
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	0.99	0.98	1.03	1.07	1.10

keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara
Sumber: BPS Kabupaten Natuna

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung konsisten. Adapun rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB dari tahun 2013 s.d 2017 adalah 0,99 (2013); 0,98 (2014); 1,03 (2015); 1,07 (2016) dan 1,10 (2017). Hal ini terjadi karena pertumbuhan nilai investasi lebih cepat dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga.

4.3 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Hampir separuh barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir berkisar dari 23,10 s.d 28,15 persen. Konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya begitu juga dengan proporsinya terhadap PDRB ikut mengalami peningkatan. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (yakni digunakan untuk PMTB atau net ekspor) memiliki peran yang semakin besar.

Tabel 15. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Natuna, Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Juta Rp)					
a. Rumah tangga	2 146 046.49	2 420 322.27	2 780 468.57	3 181 781.18	3 511 910.57
b. LNPRT	7 902.55	8 693.12	9 878.23	10 495.23	11 031.27
c. Pemerintah	1 439 389.08	1 664 013.84	1 745 351.69	1 904 617.23	1 994 965.80
J u m l a h	3 593 338.12	4 093 029.22	4 535 698.49	5 096 893.64	5 517 907.64
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	15 558 329.18	16 821 784.14	17 893 986.29	18 552 328.13	19 604 964.77
Proporsi	23.10	24.33	25.35	27.47	28.15

keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara
Sumber: BPS Kabupaten natuna

4.4 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana: = PMTB tahun ke t
 = Output tahun ke t
 = Output tahun ke t-1

Tabel 16. Incremental Capital Output Ratio (ICOR),
Kabupaten Natuna, Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Juta Rupiah)	13 009 831.50	13 585 406.93	14 115 265.93	14 538 928.91	14 665 423.36
Perubahan (Juta rupiah)	572 512.87	575 575.43	529 858.99	423 662.98	126 494.45
PMTB (ADHK 2010) (Juta Rp)	1 814 922.76	1 905 122.19	1 950 716.61	1 987 079.85	2 080 682.21
ICOR	3.17	3.31	3.68	4.69	16.45

keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara
 Sumber: BPS Kabupaten Natuna

Data di atas menunjukkan besaran ICOR Kabupaten Natuna selama periode 2013 s.d. 2017 berada pada kisaran angka 3,17 s.d. 16,45. Jika nilai ICOR 16,45 pada tahun 2017 maksudnya adalah untuk menaikkan output sebesar 1 juta rupiah maka diperlukan investasi sebesar 16,45 juta rupiah artinya perekonomian akan tumbuh 16,45 dari nilai investasi yang dikeluarkan.

Nilai ICOR yang efisien, secara umum berada di kisaran 3% hingga 4%, yang artinya untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) satu persen di suatu daerah, dibutuhkan tambahan investasi hingga 3% hingga 4%. Nilai ICOR yang semakin kecil, mengindikasikan terjadinya efisiensi dalam proses investasi, sebaliknya nilai ICOR yang membesar menggambarkan tingginya in-efisiensi investasi.

<https://natunakab.bps.go.id>



5

PENUTUP

1. PDRB menurut penggunaan tahun 2013 s.d 2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Natuna pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. PDRB Kabupaten Natuna baik adh Berlaku maupun adh Konstan terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2013-2017. PDRB Kabupaten Natuna adh Berlaku tahun 2013 sebesar 15,56 triliun rupiah menjadi 19,60 triliun rupiah pada tahun 2017. Sedangkan PDRB adh Konstan 2010 tahun 2013 sebesar 13,00 triliun rupiah meningkat menjadi 14,66 triliun rupiah pada tahun 2017.
3. Kontribusi PDRB menurut pengeluaran selama periode 2013-2017 relatif stabil. Kontribusi PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, PMTB dan pengeluaran konsumsi pemerintah dan net ekspor. Pada tahun 2017 kontribusi keempat komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB menurut pengeluaran masing-masing sebesar 17,91 persen; 16,23 persen, 10,18 persen dan 55,59 persen.
4. Kecenderungan nilai ICOR Kabupaten Natuna semakin besar dari 3,17 pada tahun 2013 menjadi 16,45 pada tahun 2017. Capaian ini mengindikasikan bahwa produktivitas PMTB menggambarkan tingginya in-efisiensi investasi.



LAMPIRAN

**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Kabupaten Natuna Tahun 2013-2017 (juta rp)**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	2 146 046.49	2 420 322.27	2 780 468.57	3 181 781.18	3 511 910.57
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1 112 441.80	1 231 595.36	1 431 093.76	1 673 344.63	1 844 612.46
b. Pakaian dan Alas Kaki	85 510.74	93 999.85	104 280.25	118 724.16	129 646.78
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	203 285.44	231 680.87	262 143.09	292 219.47	318 526.77
d. Kesehatan & Pendidikan	152 598.75	175 715.14	197 551.31	219 078.19	239 257.19
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	528 707.60	612 918.20	699 153.12	782 218.70	873 505.71
f. Hotel & Restoran	29 194.79	35 895.94	43 581.68	48 879.98	54 222.66
g. Lainnya	34 307.36	38 516.90	42 665.34	47 316.05	52 138.99
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7 902.55	8 693.12	9 878.23	10 495.23	11 031.27
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 439 389.08	1 664 013.84	1 745 351.69	1 904 617.23	1 994 965.80
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2 177 585.03	2 471 816.12	2 710 557.53	2 970 843.41	3 182 302.42
5. Perubahan Inventori	57 387.08	53 129.71	15 355.77	12 403.73	7 313.00
6. Ekspor Barang dan Jasa	20 832 035.59	22 538 156.90	25 930 476.87	26 614 565.66	27 917 008.87
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	9 730 018.94	10 203 809.08	10 632 374.50	10 472 187.35	10 897 441.71
Total PDRB	15 558 329.18	16 821 784.14	17 893 986.29	18 552 328.13	19 604 964.77

keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara
Sumber: BPS Kabupaten Natuna

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (2010)

Menurut Pengeluaran Kabupaten Natuna Tahun 2013-2017 (juta rp)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1 875 354.42	2 011 148.55	2 155 445.23	2 333 095.12	2 460 717.96
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	934 040.28	995 397.42	1 064 643.23	1 163 288.93	1 217 281.62
b. Pakaian dan Alas Kaki	76 151.70	81 740.20	88 359.16	94 940.32	100 944.61
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	186 372.82	199 590.59	214 040.11	229 789.33	239 462.78
d. Kesehatan & Pendidikan	127 287.28	135 488.72	143 501.57	150 425.37	158 638.28
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	495 978.86	539 305.56	580 834.58	625 385.33	670 415.35
f. Hotel & Restoran	25 292.54	27 374.41	29 864.10	32 516.32	34 790.25
g. Lainnya	30 230.95	32 251.65	34 202.48	36 749.51	39 185.07
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6 453.01	6 882.63	7 213.32	7 404.26	7 450.27
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 258 378.69	1 309 538.22	1 250 203.43	1 287 583.88	1 305 879.66
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1 814 922.76	1 905 122.19	1 950 716.61	1 987 079.85	2 080 682.21
5. Perubahan Inventori	38 397.36	34 924.78	9 766.44	7 537.40	4 208.12
6. Ekspor Barang dan Jasa	19 132 890.56	20 157 549.55	20 739 568.11	21 260 163.90	21 394 713.58
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	8 016 325.26	8 317 790.56	8 741 920.89	8 916 228.39	8 806 485.14
Total PDRB	13 009 831.50	13 585 406.93	14 115 265.93	14 538 928.91	14 665 423.36

keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara

Sumber: BPS Kabupaten Natuna

Lampiran 3. Distribusi PDRB Kabupaten Natuna Atas Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	13.79	14.39	15.54	17.15	17.91
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	51.84	50.89	51.47	52.59	52.52
b. Pakaian dan Alas Kaki	3.98	3.88	3.75	3.73	3.69
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9.47	9.57	9.43	9.18	9.07
d. Kesehatan & Pendidikan	7.11	7.26	7.10	6.89	6.81
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	24.64	25.32	25.15	24.58	24.87
f. Hotel & Restoran	1.36	1.48	1.57	1.54	1.54
g. Lainnya	1.60	1.59	1.53	1.49	1.48
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9.25	9.89	9.75	10.27	10.18
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	14.00	14.69	15.15	16.01	16.23
5. Perubahan Inventori	0.37	0.32	0.09	0.07	0.04
6. Ekspor Barang dan Jasa	133.90	133.98	144.91	143.46	142.40
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	62.54	60.66	59.42	56.45	55.59
Total PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara
 Sumber: BPS Kabupaten Natuna

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	8.11	7.24	7.17	8.24	5.47
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7.45	6.57	6.96	9.27	4.64
b. Pakaian dan Alas Kaki	5.95	7.34	8.10	7.45	6.32
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8.52	7.09	7.24	7.36	4.21
d. Kesehatan & Pendidikan	7.24	6.44	5.91	4.82	5.46
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10.12	8.74	7.70	7.67	7.20
f. Hotel & Restoran	7.90	8.23	9.09	8.88	6.99
g. Lainnya	3.52	6.68	6.05	7.45	6.63
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5.77	6.66	4.80	2.65	0.62
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5.78	4.07	- 4.53	2.99	1.42
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.13	4.97	2.39	1.86	4.71
5. Perubahan Inventori	- 35.88	- 9.04	- 72.04	- 22.82	- 44.17
6. Ekspor Barang dan Jasa	4.60	5.36	2.89	2.51	0.63
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	4.05	3.76	5.10	1.99	- 1.23
Total PDRB	4.60	4.42	3.90	3.00	0.87

keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara
 Sumber: BPS Kabupaten Natuna

Lampiran 5. Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Natuna menurut Pengeluaran (2010=100), 2013-2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	114.43	120.35	129.00	136.38	142.72
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	119.10	123.73	134.42	143.85	151.54
b. Pakaian dan Alas Kaki	112.29	115.00	118.02	125.05	128.43
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	109.07	116.08	122.47	127.17	133.02
d. Kesehatan & Pendidikan	119.89	129.69	137.66	145.64	150.82
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	106.60	113.65	120.37	125.08	130.29
f. Hotel & Restoran	115.43	131.13	145.93	150.32	155.86
g. Lainnya	113.48	119.43	124.74	128.75	133.06
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	122.46	126.31	136.94	141.75	148.07
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	114.38	127.07	139.61	147.92	152.77
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	119.98	129.75	138.95	149.51	152.95
5. Perubahan Inventori	149.46	152.13	157.23	164.56	173.78
6. Ekspor Barang dan Jasa	108.88	111.81	125.03	125.19	130.49
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	121.38	122.67	121.63	117.45	123.74
Total PDRB	119.59	123.82	126.77	127.60	133.68

keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara
 Sumber: BPS Kabupaten Natuna

Lampiran 6. Laju Implisit PDRB Kabupaten Natuna menurut Pengeluaran Tahun 2013-2017 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	5.94	5.17	7.19	5.72	4.65
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7.55	3.89	8.64	7.01	5.35
b. Pakaian dan Alas Kaki	3.69	2.41	2.63	5.96	2.70
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3.77	6.42	5.51	3.83	4.60
d. Kesehatan & Pendidikan	4.40	8.18	6.15	5.79	3.56
e. Transportasi, Komunikasi,	4.30	6.61	5.91	3.91	4.17
f. Hotel & Restoran	6.49	13.60	11.29	3.01	3.68
g. Lainnya	8.18	5.24	4.45	3.21	3.34
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7.61	3.14	8.42	3.51	4.46
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0.20	11.09	9.87	5.96	3.28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.25	8.14	7.10	7.60	2.30
5. Perubahan Inventori	28.40	1.79	3.36	4.66	5.60
6. Ekspor Barang dan Jasa	- 3.28	2.69	11.82	0.12	4.23
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	8.05	1.07	- 0.86	- 3.43	5.36
Total PDRB	6.48	3.54	2.38	0.66	4.76

keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara
 Sumber: BPS Kabupaten Natuna

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NATUNA**

Jl. HR Soebrantas Sual RT 001 RW 06
Kel. Ranai, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna
email: bps2103@mailhost.bps.go.id
website: <http://natunakab.bps.go.id>